

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban dan tugas anggota DPRD seperti tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 45 tentang kewajiban DPRD adalah melayani masyarakat. Kedudukan serta adanya DPRD sangat berpengaruh dan penting sekali bagi lajunya perkembangan suatu daerah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat banyak di dalamnya guna mewujudkan suatu kebijakan yang saling terpadu untuk melaksanakan kewajiban bersama. Salah satu tugas pokok, fungsi maupun wewenang anggota DPRD juga adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Kemampuan DPRD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi maupun wewenang anggota DPRD, dapat menunjukkan kinerja anggota DPRD itu sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam perubahan suatu daerah. Akan tetapi, realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketidakpahaman anggota dewan akan tugas mereka yang sering diperlihatkan kebanyakan di acara televisi. Keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada

peran untuk membantu eksekutif untuk menjalankan tugas pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan (Robinson Tarigan, 2006).

Menerima, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sangatlah memerlukan pengetahuan yang luas agar mengerti, memahami serta dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal, akan terlihat bahwa adanya kelemahan dari pihak Internal yaitu anggota dewan itu sendiri. Terkadang kondisi ini tidak menjadi perhatian penting bagi anggota DPRD karena kurangnya perhatian khusus dalam menerima maupun mencerna aspirasi masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah. Untuk memahami keinginan masyarakat, anggota dewan dituntut untuk mempunyai pengetahuan tinggi yang berhubungan dengan pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan itu sendiri.

Dalam menjalankan fungsi ataupun wewenang mereka dituntut harus mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Disamping itu juga, dalam menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, anggota DPRD harus memiliki banyak pengetahuan, sehingga dengan kata lain pendidikan sangatlah berpengaruh bagi kinerja anggota dewan. Dengan adanya pendidikan yang memadai, anggota dewan dapat mengerti apa yang harus dilakukan oleh anggota dewan itu sendiri

mengenai tugas pokok ataupun fungsi dari lembaga yang menaungi mereka. Pendidikan itu sendiri diyakini sangat berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang, bahkan dalam kinerja seseorang termasuk kinerja anggota DPRD. Artinya secara rata-rata makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin memungkinkan orang tersebut untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan.

Pendidikan sebenarnya bukan hanya terkait dengan kemampuan untuk memperoleh tingkat hasil kinerja yang lebih baik tapi juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sehingga terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak harus didapatkan di sekolah, tetapi pendidikan juga bisa didapatkan di luar sekolah misalnya di sebuah Organisasi, komunitas, forum mau pun masyarakat bersosialisasi. Dengan adanya pendidikan di luar pendidikan formal seseorang akan mendapatkan pendidikan karakter, cara bicara, berpikir luas, lebih toleransi dan juga lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Bagi seseorang yang berpengaruh di sebuah organisasi luar maupun pemerintah pendidikan sangatlah penting untuk menjelaskan karakter dan sikap seseorang. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya didapatkan melalui jalur formal tetapi juga Informal maupun Nonformal. Dengan adanya pendidikan yang dilalui oleh seseorang dapat menjadikan seseorang ataupun masyarakat itu sendiri menjadi lebih baik dalam bersosialisasi maupun dalam mengembangkan amanat yang telah diamanahkan oleh masyarakat lain. Dalam artian masyarakat yang

memiliki kewajiban untuk memajukan suatu tempat dengan dibekali oleh pendidikan yang sekian banyak mereka dapatkan di jalur formal, informal maupun nonformal tersebut maka semakin baik pula kualitas diri maupun kualitas kerja yang mereka dapatkan sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Selain dapat meningkatkan kualitas diri maupun kualitas kinerja seseorang, memiliki pendidikan dapat juga mencapai taraf hidup yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai potensi serta kepribadian yang memungkinkan dia diterima dalam pergaulan dengan individu yang lain. Karena setiap individu akan menyalurkan potensinya tersebut untuk kepentingan tertentu, kemudian individu lain dapat menerima dan mengakuinya. Atas dasar itulah individu tersebut akan mendapatkan status dalam sebuah kelompok. Dengan kata lain pendidikan informal, formal maupun nonformal sangat berpengaruh penting bagi masyarakat banyak dalam menentukan attitude, cara berfikir, cara bersosialisasi, kualitas diri maupun kualitas kinerja seseorang.

Pendidikan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan semua kalangan masyarakat Indonesia terutama mereka yang mengemban amanat masyarakat dan sebagai perantara masyarakat untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Bagi kalangan masyarakat biasa pendidikan menjadi hal biasa untuk didapatkan atau tidak, tetapi lain halnya dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang mana pendidikan sangatlah penting bagi mereka, karena dengan adanya pendidikan yang lebih yang dimiliki oleh

para anggota dewan akan mempermudah mereka dalam mengerti segala hal yang diinginkan oleh masyarakat dan juga mempermudah mereka dalam menindaklanjuti semua isu-isu yang berkembang di masyarakat. Di luar negeri menjadi perwakilan rakyat tidak ada syarat yang signifikan mengenai tingkat pendidikan untuk calon legislatif tetapi lain halnya dengan di Indonesia yang memiliki syarat tertentu. Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan bahwa persyaratan bagi calon legislatif yaitu minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (detikNew, 2015).

Pendidikan anggota DPRD di Indonesia rata-rata lulusan SMA dan sedikit yang mempunyai latar belakang pendidikan sarjana, karena syarat untuk menjadi anggota DPRD adalah minimal lulusan Sekolah Menengah Atas sehingga mewajibkan untuk para caleg maupun anggota DPRD mempunyai ijazah SMA.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Halmahera” menekankan pada hasil kinerja anggota DPRD dalam menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Frian Gar Andea, 2013). Sedangkan yang akan peneliti survey adalah permasalahan pada Pengaruh Tingkat Pendidikan Anggota DPRD yang berpengaruh terhadap Kinerja Anggota Dewan dalam Menampung, Menerima dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat. Dengan kata lain peneliti lebih mengutamakan pengaruh tingkat pendidikan dan hasil kinerja anggota DPRD dalam menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat. Karena dalam kasus ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai adanya pengaruh tingkat pendidikan anggota DPRD komisi D mengenai kualitas kinerja mereka dalam menampung, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah disalurkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena sosial yang terjadi di kalangan anggota DPRD Bantul Jogja mengenai Rapat Paripurna 18 anggota DPRD bolos (Bhekti Suryani, JIBI, HarianJogya). Dalam artikel tersebut Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis menyatakan bahwa sekitar 18 anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut dengan tanpa keterangan. Sedangkan 13 orang sisanya beralasan karena adanya keperluan dan melaksanakan tugas. Padahal telah diketahui didalam artikel bahwa rapat tersebut adalah rapat yang menentukan nasib hampir satu juta masyarakat Bantul. Dari sini peneliti menemukan sikap yang kurang disiplin yang dilakukan oleh oknum pemerintah atau DPRD. Padahal dengan adanya rapat paripurna tersebut dapat diketahui kendala-kendala maupun aspirasi-aspirasi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap politik anggota DPRD Bantul ?
2. Bagaimana kinerja Dewan di DPRD Bantul ?
3. Bagaimana aspirasi masyarakat tertampung dalam pembangunan Kab. Bantul ?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah atau memperluas pemahaman tentang teori-teori tingkat pendidikan dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus yang sama.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi bagi peneliti dalam mengetahui bahwa adanya pengaruh yang sangat penting mengenai Tingkat Pendidikan anggota DPRD terhadap Kinerja Anggota Dewan dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan juga sebagai bahan masukan ataupun sebagai bahan pemikiran untuk anggota dewan itu sendiri agar tetap memberikan yang terbaik. Adapun manfaat penelitian ini merupakan syarat peneliti untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dan juga menambah wawasan dan wacana mengenai karakteristik pendidikan anggota dewan beserta kinerjanya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan anggota DPRD Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja anggota dewan di DPRD Bantul.
3. Untuk mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat tertampung dalam pembangunan Kab. Bantul.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian untuk menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antara variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Teori memiliki peranan yang sangat besar dalam sebuah unsur penelitian, karena dengan unsur penelitian inilah peneliti dapat mencoba menjelaskan fenomena sosial atau alami yang dijadikan acuan untuk menjelaskan fenomena tersebut (Nina Nurani Afiari, 2012:13).

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan alat yang paling penting untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menghubungkan antar fenomena sosial maupun fenomena yang alami yang ingin diteliti (Nina Nurani Afiari, 2012, 14). Berdasarkan penjelasan konsep diatas, maka dapat dipaparkan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap Politik

Sikap politik merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek atau suatu pokok permasalahan untuk mempengaruhi kebijakan politik disuatu negara atau pemerintahan.

Franciscus Xaverius Seda yang dikutip oleh Nina Nurani Afiari dalam penelitiannya mengenalkan dua tipe politisi dalam menentukan sikap politiknya, yakni para politisi yang dalam mengambil sikap terhadap suatu masalah politik mendahulukan popularitas politik, dan mereka yang mengutamakan kepribadian politiknya. Ini tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki

kepribadian politik tidak juga memperhatikan masalah popularitasnya, dan sebaliknya bahwa seseorang yang mengejar popularitas tidak memiliki kepribadian politik. Namun, masalahnya adalah masalah mendahulukan, masalah prioritas dan preferensi dalam mengambil sikap politik. Sikap politik terdiri dari beberapa tingkatan yakni:

a) Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang atau kelompok (subjek) mau menerima kebijakan dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Dalam artian bagaimana cara aparat pemerintah tersebut dalam menerima aspirasi masyarakat itu sendiri. Sikap menerima dapat dikategorikan dalam keadaan baik maupun tidak baik (Nina Nurani Afiari, 2012, 18).

b) Merespon (responding)

Memberikan tanggapan apabila ada setiap kebijakan yang muncul, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk memberikan tanggapan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam hal ini merespon juga bisa dikategorikan merespon dengan baik atau tidak baik. Dalam teori ini dapat dilihat bagaimana cara seseorang ataupun aparat pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat

apakah langsung ditanggapi atau pun tidak (Nina Nurani Afiari, 2012, 18).

c) Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Dari teori menghargai ini dapat dilihat sikap politik yang dimiliki oleh aparat pemerintah tersebut dalam menanggapi aspirasi masyarakat lalu dapat dilihat sikap apa yang diperlihatkan oleh aparat pemerintah tersebut sekaligus melihat sejauh mana sikap saling menghargai antar sesama terhadap pendapat orang lain (Nina Nurani Afiari, 2012, 18).

d) Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Bertanggung jawab adalah yang mana seseorang ataupun aparat pemerintah tersebut diembankan pada suatu permasalahan, maka disaat itu juga dapat dilihat sejauh mana rasa tanggung jawab ataupun sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat pemerintah tersebut dalam menyelesaikan tanggung jawabnya baik (Nina Nurani Afiari, 2012, 18).

Robert Lane dan David Sears yang dikutip oleh Nina Nurani Afiari berpendapat bahwa sikap politik atau pendapat umum dapat memberikan pengarahan. Ini berarti bahwa beberapa individu akan menyetujui pandangan tertentu sedangkan individu yang lain akan menentanginya. Sikap politik adalah pandangan berbagai kalangan warga masyarakat atau kelompok mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama mereka dalam suatu masyarakat. Tercakup disini adalah persetujuan dan tidak setuju atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Proses pembentukan pendapat berkaitan erat dengan proses sosialisasi politik, partisipasi, dan rekrutmen politik. Dalam hal ini pengetahuan, nilai-nilai, sikap merupakan faktor penting, karena faktor-faktor itulah yang menentukan perilaku politik. Selain menentukan perbedaan pengetahuan, nilai-nilai budaya dan sikap-sikap mereka menentukan perbedaan pandangan tentang berbagai isu politik.

Sikap politik bisa tidak konsisten berdasarkan dua alasan. *Pertama*, karena seseorang atau kelompok mungkin saja menganut suatu pendapat yang hanya sampai pada tingkatan tertentu. *Kedua*, karena pendapat tertentu itu tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Pendapat bisa lebih konsisten apabila hubungan tingkat rasionalitas seseorang atau suatu masyarakat yang tinggi, karena individu yang rasional lebih terbuka terhadap berbagai macam

informasi. Untuk menjadikan individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih rasional, individu atau kelompok masyarakat harus membuka diri baik terhadap hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan (Nina Nurani Afiari, 2012).

Pendapat umum atau sikap politik juga dapat berubah dan itu dapat disebabkan oleh dua faktor tersebut. *Pertama*, karena banyaknya perlawanan atas pendapat dari berbagai kalangan yang menghendaki perubahan segala yang ada. *Kedua*, karena ketidakpercayaan atas pihak-pihak yang sebelumnya dijadikan sumber informasi yang diandalkan. Maka dengan adanya sikap politik yang dimiliki oleh aparat pemerintah dapat menunjukkan kualitas diri maupun kualitas kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama walaupun akan adanya pertentangan maupun persetujuan dari banyak pihak (Nina Nurani Afiari, 2012). Maka dalam teori ini maka penulis bukan ingin mengetahui sikap politik anggota dewan secara arti yang sebenarnya dari sikap politik tersebut, tetapi peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh anggota dewan itu sendiri dalam menerima, merespon maupun menindaklanjuti isu-isu dan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD adalah sebuah lembaga dewan perwakilan rakyat di daerah. Hal ini mengakibatkan untuk mendapatkan kursi di DPRD ini seseorang harus melalui beberapa tahapan sebagai kendaraan politik menuju DPRD. Terlebih dahulu seseorang harus mengikuti proses rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rekrutmen ini dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART Partai Politik dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Setelah melalui tahapan tersebut maka partai politik akan mendaftarkan bakal calonnya untuk menjadi peserta pemilihan umum. DPRD Kabupaten/Kota ini terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum (Nina Nurani Afiari, 2012).

Legislatif daerah atau juga disebut sebagai DPRD, mempunyai tugas yang sangat strategis dan dibekali dengan hak dan wewenang yang luas untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk mencapai tingkat fungsional yang memadai maka setiap anggota DPRD secara individu dan DPRD secara kelembagaan harus memenuhi dan mengkaji ulang posisi tugas sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.

Mengenai kedudukan DPRD, Affan Gaffar mengenai analisis sikap politik DPRD kabupaten Bantul tahun 2010 terhadap RUUK daerah istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa: “DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan ini secara yuridis ketentuan DPRD sangat kuat dan setara dengan kekuasaan eksekutif (pemerintah daerah) bahkan menempatkan DPRD sebagai *actor penting* dalam proses pengambilan kebijakan publik didaerah”.

Melihat begitu strategisnya tugas dan wewenang DPRD maka sudah semestinya bila hal ini diimbangi dengan kesiapan anggota DPRD untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Eksistensi DPRD diperlukan dalam mengemban misi kedaulatan rakyat daerah. DPRD ini adalah di mana sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi mereka untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih baik dan untuk mencapai tujuan bersama.

3. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Proses penyerapan aspirasi masyarakat ada dua menurut Dwiyanto dkk (2003) yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah melalui proses perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat

oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung (D Warastuti, 2013).

Penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD secara langsung dengan dialog tatap muka, seminar dan lokakarya, kegiatan saat kunjungan kerja baik masa sidang atau memasuki masa reses. Bertujuan untuk menyerap, menghimpun, menampung aspirasi masyarakat. Secara tidak langsung berupa konsultasi dengan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi yang disalurkan dari pemerintah daerah. Hasil reses DPRD adalah hasil dari kunjungan DPRD ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat berupa program dan kegiatan yang nantinya diusulkan oleh DPRD dalam (D Warastuti, 2013). Dalam teori penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat dikaji mengenai bagaimana proses yang terjadi dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat menggunakan teori ini agar masyarakat mengetahui bagaimana dan sejauh mana aparat pemerintah tersebut menindaklanjuti ide-ide mereka dan akan berdampak lebih baik untuk kinerja pada aparat pemerintah ini sendiri.

4. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang. Beraspirasi, bercita-cita, berkeinginan, berhasrat

serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tertentu. Aspirasi dalam bahasa Inggris “*aspiration*” berarti cita-cita. Menurut Echols *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau berkeinginan. Sedangkan menurut Purwadarminta adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras) (Friar Gar Andea, 2013).

Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock menyatakan setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang (Friar Gar Andea, 2013).

Masyarakat berasal dari bahasa Arab ‘*musyarak*’. Masyarakat mempunyai arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka (Friar Gar Andea, 2013).

Menurut Znaniecki yang dikutip oleh Friar menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu dari suatu generasi (Friar Gar Andea, 2013).

Sementara menurut Laski yang dikutip oleh Friar dalam *The State In Theory and Practice* bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk

mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Maka dengan teori ini dapat dilihat bagaimana sistem aspirasi masyarakat ini dapat mempengaruhi pembangunan daerah karena dengan otomatis mencakup ide-ide masyarakat yang mana akan ditampung oleh aparat pemerintah sebagai bahan pemikiran untuk merubah keadaan menjadi lebih baik atau tidak (2013).

5. Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “*kerja*” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing ‘*performance*’. Bisa pula berarti ‘*hasil kerja*’. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mangkunegara (2000:67) yang dikutip oleh Septiana Tri Rahayu dalam penelitiannya bahwa “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Septiana Tri Rahayu, 2010).

Menurut Sulistiyani kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang didapat dinilai dari hasil kerjanya. Menurut Hasibuan mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Nawawi yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun nonfisik/non mental (Septiana Tri Rahayu, 2010). Kinerja di sini adalah bagaimana hasil dari kerja seseorang ataupun kinerja aparatur dalam menampung, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang terdapat pada bagian menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab atas kewajibannya di lembaga pemerintah Bantul.

6. Indikator Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi.

Menurut Mahsun (2006) yang dikutip oleh Septiana Tri Rahayu dalam penelitiannya mengenai kinerja pelayanan publik pada kantor kecamatan pandak kabupaten bantul bahwa indikator kinerja terdiri dari :

a. Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas

Pelayanan dalam menampung, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah sesuai dengan kualitas kinerja anggota DPRD. Peneliti ingin mengetahui dengan adanya pelayanan tepat waktu dan berkualitas

apakah aparat pemerintah tersebut dalam menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat tersebut.

- b. Tingkat ketrampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja.

Keterampilan pendidikan anggota DPRD telah sesuai dengan aspek menerima, merespon maupun menghargai aspirasi masyarakat telah sesuai dengan tingkat pendidikannya maupun bidang kerjanya.

- c. Kehadiran/keterlambatan

Ada keterlambatan anggota DPRD Bantul ini dalam menerima, menampung, menghargai, merespon maupun menindaklanjuti keinginan-keinginan masyarakat Bantul.

F. Definisi Konseptual

Definisi yang mana yang digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan ataupun menggambarkan suatu kejadian sosial yang bersifat abstrak ataupun dalam situasi yang kompleks. Adapun definisi konseptual dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup yang dimulai oleh seseorang sejak lahir hingga kematiannya guna untuk mewujudkan warga negara yang ideal. Pendidikan dapat dilihat dari mana sumber pendidikan tersebut. Sedangkan

pendidikan dapat dihasilkan melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal.

2. Sikap politik adalah suatu reaksi yang berupa tindakan maupun pemikiran dalam menanggapi suatu permasalahan politik ataupun permasalahan masyarakat. Sikap politik dapat dilihat dari bagaimana sikap anggota DPRD dalam menerima, merespon dan bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat yang telah disalurkan. Sikap politik di sini adalah bagaimana para anggota DPRD mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.
3. DPRD adalah suatu kelembagaan yang menjadi perantara antara masyarakat dengan oknum pemerintah dalam menyampaikan aspirasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam DPRD sebagaimana fungsinya yaitu sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maka DPRD berkewajiban untuk menampung sekaligus merealisasikan ide-ide masyarakat untuk memajukan daerah.
4. Penyerapan adalah suatu sikap ataupun cara untuk menerima sebuah masukan ataupun ide-ide masyarakat yang dilakukan dengan banyak cara baik secara langsung maupun tidak langsung lalu dikumpulkan dan didiskusikan kembali untuk penetapan apakah akan direalisasikan atau tidak.

5. Aspirasi masyarakat adalah kumpulan pendapat-pendapat yang ditimbulkan oleh adanya ketidaksesuaian keinginan dari seseorang ataupun masyarakat itu sendiri pada suatu kebijakan guna untuk melihat bagaimana ide-ide yang telah berkembang di kalangan masyarakat.
6. Kinerja adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang setelah suatu pekerjaan telah dilakukan. Terutama kinerja anggota DPRD dalam menerima, merespon, menghargai maupun bertanggung jawab atas kewajibannya dalam menampung, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel yang akan diamati dalam pemecahan masalah dan bersifat tidak boleh berbeda makna dengan definisi nominal. Hal itu dilakukan agar tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh para peneliti. Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari kelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Sugiyono dalam Husein Umar (Frian Gar Andea, 2013).

Dalam penelitian ini variabel dan definisi operasional yang digunakan adalah :

1. Tingkat pendidikan adalah peneliti akan melakukan survei untuk mengetahui standar umum tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD ditempat penelitian peneliti yaitu DPRD Bantul dan dari

penelitian tersebut peneliti juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan cara maupun hasil antara pendidikan formal yang dapat dilihat dari ijazah yang dimiliki selama mengikuti pendidikan seperti ijazah SD, SMP, SMA. Nonformal yang mana dapat diukur dari kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi apa saja yang pernah diikuti sertakan oleh anggota dewan tersebut seperti lembaga pelatihan, lembaga kursus, organisasi masyarakat, majelis taklim, paket A, paket B maupun paket C dalam memperluas tingkat pendidikan mereka sedangkan Informal yang notabennya pendidikan tersebut didapati dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan bersosialisasi lainnya yang dapat membentuk kepribadian, karakter, etika, sopan santun anggota dewan sehingga telah diaplikasikan oleh anggota dewan tersebut sesuai dengan bidang kerja dan hasil kerjanya.

2. Penyerapan aspirasi masyarakat adalah bagaimana cara seseorang dalam menerima, merespon maupun menghargai pendapat-pendapat masyarakat demi perubahan dan mencapai tujuan bersama dengan demikian peneliti akan melihat secara langsung maupun akan meneliti dan mencari informasi mengenai bagaimana cara anggota DPRD Bantul dalam menyerap, menerima, merespon maupun merealisasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan apakah ada aspirasi-aspirasi yang tidak bisa diterima maupun direalisasikan oleh anggota dewan Bantul.

3. Sikap politik adalah respon politik yang akan di perhatikan oleh seseorang dalam menanggapi isu yang ada di kalangan masyarakat dan peneliti akan melihat respon politik ataupun bagaimana sikap anggota DPRD dalam menerima, menghargai, merespon dan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai solusi

Indikator sikap politik :

- a. Menerima (receiving)

Peneliti akan melihat ataupun melakukan survei untuk mengetahui bagaimana cara ataupun hasil dari mendengarkan aspirasi masyarakat itu sendiri apakah diterima atau tidaknya oleh anggota DPRD tersebut dalam menerima aspirasi dari masyarakat.

- b. Merespon (responding)

Peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota dewan terutama pada Komisi D itu sendiri untuk mengetahui bagaimana cara mereka dalam merespon aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian peneliti akan mengetahui apakah aspirasi tersebut akan direspon secara cepat atau tidak.

- c. Menghargai (valuing)

Dari indikator ini peneliti akan melakukan survei ataupun terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana cara kerja anggota DPRD Bantul dalam menerima sampai dengan menghargai aspirasi masyarakat dan melihat apakah ada bentuk

penghargaan dari anggota DPRD kepada aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

d. Bertanggung jawab

Indikator ini dilakukan untuk melihat hasil dari bagaimana cara anggota dewan tersebut merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat apakah ada rasa tanggung jawab yang besar ataukah adanya sikap ketidakpedulian terhadap aspirasi-aspirasi tersebut.

4. Kinerja adalah peneliti akan melakukan survei terhadap kinerja anggota dewan Bantul

Indikator kinerja :

a. Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas

Peneliti akan melakukan wawancara ataupun terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan di DPRD Bantul apakah tepat waktu atau tidak aspirasi-aspirasi tersebut diterima, direspon maupun direalisasikan.

b. Tingkat ketrampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja

Dalam indikator ini peneliti akan melakukan survei, wawancara dan mengolah data-data yang ada mengenai tingkat pendidikan anggota dewan tersebut dengan

bagaimana hasil kinerjanya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh sesuai dengan bidang kerjanya.

c. Kehadiran/keterlambatan

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan survei untuk melihat bagaimana proses anggota dewan Bantul dalam menanggapi aspirasi masyarakat terutama melihat adakah keterlambatan dalam merespon aspirasi masyarakat.

5. DPRD adalah suatu kelembagaan pemerintah yang berfungsi sebagai perantara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan negara. Oleh karenanya peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana DPRD itu sendiri dalam menjalankan tugas sebagaimana fungsinya dengan cara melakukan survei, terjun ke lapangan, wawancara ataupun mengelolah data yang ada berkaitan dengan kinerja anggota dewan apakah DPRD telah berperan selayaknya sebagai perantara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam mewujudkan daerah menjadi lebih baik.

Untuk lebih jelas definisi konseptual dan definisi operasional penulis sampaikan berbentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Definisi Konseptual dan Operasional

No	Definisi konseptual	Definisi operasional	Instrumen	Ket
1	Tingkat pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup yang dimulai seseorang sejak lahir hingga kematiannya guna untuk mewujudkan warga negara yang ideal.	Peneliti akan melakukan survei untuk mengetahui standar umum tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD Bantul melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.	Peneliti akan meneliti tingkat pendidikan anggota dewan melalui : -Formal : Ijazah SD, SMP dan SMA. -Nonformal : kegiatan-kegiatan organisasi, pelatihan, lembaga kursus, organisasi masyarakat, paket A, B maupun C. -Informal : kepribadian, karakter, etika, sopan santun yang notabennya biasa didapatkan dari lingkungan keluarga	
2	Sikap politik adalah suatu reaksi yang berupa tindakan maupun pemikiran dalam menanggapi suatu permasalahan politik ataupun permasalahan masyarakat.	respon politik yang akan diperlihatkan oleh seseorang dalam menanggapi isu yang ada di kalangan masyarakat maka peneliti ingin melihat respon politik anggota DPRD dalam menerima, merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.	indikator sikap politik : -menerima (receiving) -merespon (responding) -menghargai (valuing) -bertanggung jawab	
3	DPRD adalah suatu kelembagaan yang menjadi perantara antara masyarakat dengan oknum pemerintah dalam menyampaikan aspirasi untuk mewujudkan tujuan bersama.	DPRD adalah suatu kelembagaan pemerintah yang berfungsi sebagai perantara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan negara.	peneliti akan melihat apakah DPRD sudah berperan selayaknya sebagai perantara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan daerah menjadi lebih baik.	

4	Penyerapan aspirasi adalah suatu sikap ataupun cara untuk menerima sebuah masukan ataupun ide-ide masyarakat yang dilakukan banyak cara baik secara langsung maupun tidak langsung.	Penyerapan aspirasi adalah bagaimana cara seseorang dalam menerima, merespon maupun menghargai pendapat-pendapat masyarakat demi perubahan dan mencapai tujuan bersama.	Peneliti akan mensurvey apakah aspirasi masyarakat telah diserap maupun ditindaklanjuti dengan baik atau tidak di Kab Bantul.
5	Kinerja adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang setelah suatu pekerjaan telah dilakukan	Peneliti akan melihat sejauh mana kinerja dewan DPRD Bantul dalam menerima, merespon, menghargai maupun menindaklanjuti aspirasi masyarakat.	Kinerja akan dilihat dari : -pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas -tingkat ketrampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja - kehadiran/keterlambatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari dari asumsi-asumsi, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian (research design) tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. Dalam mengukur, menggambarkan, menganalisa dan mengumpulkan data dalam objek penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan hasil laporan dari

penelitian tersebut (Dian Eka Rahmawati, 2010). Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif yang mana peneliti akan menjabarkan secara rinci mengenai objek yang akan diteliti. Peneliti juga akan menggambarkan objek yang diteliti secara objektif dengan cara melakukan observasi, wawancara, maupun mengolah data mentah yang terdapat di DPRD Bantul.

I. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari hasil transkrip wawancara, observasi, dokumentasi, video rekaman, dan data statistik yang lainnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif juga lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, dan lebih mementingkan proses dari pada hasil juga mementingkan pemaknaan secara kontekstual.

Di dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai alat untuk tempat pengumpulan data (Kiki Listari, 2013, 33). Peneliti disini menggunakan jenis penelitian deskriptif dikarenakan sesuai dengan judul dan permasalahan yang ingin diteliti. Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada

saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta dan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis.

Peneliti menggunakan Penelitian Kualitatif Deskriptif karena ingin menjelaskan secara rinci tentang permasalahan yang terjadi diruang lingkup anggota DPRD Bantul mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan Anggota DPRD terhadap Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Upaya dalam menggambarkan secara rinci bagaimana sikap politik penting bagi anggota dewan mengenai kinerja mereka dalam menerima, merespon dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat. Dengan adanya penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti akan menganalisa unit anggota DPRD Komisi D karena Komisi D bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Bantul salah satunya mengenai permasalahan pendidikan dan akan menggambarkan kinerja mereka dalam menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

J. Lokasi Penelitian

Merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti meneliti dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Bantul.

K. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian ini dan mampu memberikan informasi serta yang berisi tentang variabel penelitian, data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Dian Eka Rahmawati, 2010). Peneliti melakukan wawancara kepada 9 orang anggota DPRD khususnya pada bagian Komisi D DPRD Bantul yang meliputi Ketua yang dijabat oleh Bapak Enggar Suryo Jatmiko SE, Bapak Paidi S.Ip sebagai wakil ketua, Bapak H. R Ichwan Tamrin M. , S.E sebagai sekretaris dan anggota-anggota dewan komisi Drs. Timbul Harjana, Sudarmanta, Subhan Nawawi, Reshi Cahyadi, H. Sigit Nursyam Priyanto, S. Si dan H. Supriyanto, M. Si yang berwenang dalam menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Peneliti menggunakan data ini sebagai sumber utama dalam penelitian untuk mendapatkan informasi langsung yang tepat dan benar mengenai analisis sikap politik anggota DPRD dan kinerja anggota dewan Bantul dalam menampung, menerima, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data hasil kutipan yang diperoleh dari sumber lain atau tidak diperoleh dari informan secara langsung berupa arsip-arsip, surat kabar, majalah, buku, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, foto maupun video yang memiliki data tentang variabel penelitian (Dian Eka Rahmawati, 2010). Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dan didapat melalui data-data primer sebagai dasar dari penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan anggota DPRD yang berpengaruh pada kinerja mereka masing-masing. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data-data mengenai objek yang akan diteliti oleh peneliti.

L. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh antara lain melalui, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari wawancara, observasi dan dokumentasi:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi atau pembicaraan secara langsung terhadap informan yang dituju, dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian secara mendalam untuk mendapatkan data dan informasi yang

diinginkan. Draf pertanyaan dapat dikembangkan mengikuti pendalaman interaksi yang terjadi dan jawaban dari informan tersebut. Selain itu wawancara dapat digunakan sebagai alat pendukung dan pembanding. Wawancara dapat juga digunakan untuk mengecek kebenaran, ketelitian dan ketepatan data yang sudah diperoleh dengan menggunakan alat lain (Dian Eka Rahmawati, 2010). Dengan cara ini dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan langsung data-data objek yang akan diteliti dan dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dalam kinerja pemerintah Bantul dalam menyerap, menerima, merespon aspirasi masyarakat Bantul.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung mengenai keadaan konsep didalam unit analisa yang menjadi objek penelitian. Dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang *real* (nyata) terjadi didalam unit analisa dengan cara peneliti terlibat langsung kepada situasi yang terjadi didalam unit analisa itu sendiri (Dian Eka Rahmawati, 2010). Observasi pada penelitian ini yaitu melakukan observasi dengan mengunjungi kantor DPRD Bantul Komisi D untuk melihat dan mencari data melalui observasi tempat objek yang bersangkutan.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dari sumber referensi-referensi seperti dokumen, catatan, karya tulis ilmiah yang terkait dengan keadaan konsep penelitian

didalam bagian analisa dan terkait dengan objek penelitian. Sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti untuk menggambarkan objek yang akan diteliti (Dian Eka Rahmawati, 2010). Dengan demikian peneliti akan melakukan sesi dokumentasi seperti foto-foto saat wawancara, rekaman suara saat wawancara, maupun rekaman video kinerja mereka dalam menyerap aspirasi masyarakat.

M. Unit Analisa Penelitian

Dikarenakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh tingkat pendidikan anggota DPRD terhadap kinerja anggota dewan dalam menyerap, menerima, menindaklanjuti dan bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat maka bagian yang dianalisa adalah kinerja kantor anggota DPRD BANTUL bagian Komisi D yang mana akan dijadikan sebagai informan, terdiri dari kepala DPRD Komisi D dan staf-staf yang bertanggung jawab atas kinerjanya masing-masing.

N. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dapat ditarik kesimpulan diatas, teknik analisa data adalah mengorganisasikan data-data yang didapat dari hasil penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang dihasilkan dari wawancara terhadap informan dan pengamatan/observasi. Selanjutnya peneliti menganalisa, menggabungkan atau menyederhanakan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi didalam unit analisis dengan pemikiran yang logis dan metodologi terkait dari semua data yang didapatkan dari naskah wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, resmi, catatan lapangan dan lainnya. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan berbagai macam kategori fenomena sosial yang disajikan sesuai dengan data yang ada.
- b. Mengabstraksikan tema-tema fenomena sosial yang bersifat induktif
- c. Melakukan interpretasi data (Dian Eka Rahmawati, 2010). Dengan adanya pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa teknik analisa data adalah bagaimana cara mengelolah data yang sudah ada dan diurutkan sesuai dengan data yang tersedia.